BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerahnya memiliki modal sehingga dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata. Hal ini juga yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Banyumas sebagai terobosan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Selain dari sektor pertanian sebagai penghasilan utama daerah kabupaten Banyumas, pendapatan dari retribusi pariwisata bisa dikatakan cukup besar, mengingat pada sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang vital. Hampir setiap daerah memiliki obyek wisata sebagai identitas daerah tersebut, bahkan seperti yang kita ketahui bagaimana Provinsi Bali yang sangat fokus dalam mengelola sektor pariwisatanya hingga dapat diakui oleh dunia.

Dr. Salah Wahab menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks yang meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata.

Pariwisata memberikan berbagai dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat, diantaranya adalah damapak lingkungan, dampak sosial budaya dan tentunya dampak ekonomi. Dari segi ekonomi dengan adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak langsung dan dampak lanjutan. Dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah bagi pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah. Sedangkan dampak tidak langsung salah satunya bisa berupa meningkatkan permintaan akan transportasi umum publik, dan dampak berkelanjutannya tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bekerja dibidang pariwisata atau pun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak positifnya[1]

Merupakan suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu ssarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pembangunan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah, mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk Pariwisata yang diunggulkan.

Kabupaten Banyumas memiliki setidaknya 10 tempat pariwisata besar dia antaranya adalah Lokawisata Baturraden, Kali Bacin, Curug Cipendok, Wana Wisata, Pancuran Tiga, Pancuran Tujuh, Telaga Sunyi, Bumi Perkemahan, Curug Gede, Curug Ceheng, Museum Wayang SendangMas, dan Taman Rekreasi

---

[1]Ferry Pleanggra, *Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Wisatawan dan Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang 2012). Skripsi di terbitkan.

Fatmaba Ajibarang, Serayu River Voyage, kalibacin,Pangsar Soedirman dan TRAP (Taman Rekreasi Andhang Pangrenan).

Pemerintah Kabupaten Banyumas merencanakan untuk mengadakan kerjasama dibidang kepariwisataan baik itu dikawasan regional, nasional maupun internasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjamasa Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Cara Kerjasama Daerah serta aturan lain yang mengatur tentang sektor kepariwisataan, guna membangun dan mengembangkan sektor kepariwisataan yang ada di Banyumas[2]

Hal tersebut merupakan langkah kongkret keseriusan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upayanya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas. mengingat potensi yang dimiliki kabupaten Banyumas dalam sektor pariwisata cukup besar. Salah satunya adalah lokawisata Baturraden yang selama ini menjadi daya tarik wiasatawan untuk datang ke Kabupaten Banyumas.

Lokawisata Baturraden terbentang di sebelah selatan kaki gunung Slamet pada ketinggian sekitar 640 m di atas permukaan laut. Baturraden terletak hanya 14 km dari Kota Purwokerto yang dihubungkan dengan jalan yang memadai. Di tempat wisata ini anda dapat menikmati pemandangan indah dan udara pegunungan yang segar dengan suhu 18' Celcius - 25' Celcius.

---

[2]http://eoffice.Banyumaskab.go.id/assets/content_upload/file/LAKIP%20Kabupaten%20Banyumas%202013.pdf 14/01/2015 20.07wib

Sedangkan gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 m, merupakan gunung berapi terbesar dan gunung tertinggi ke-2 di Jawa. Jika cuacanya bagus, Kota Purwokerto dapat terlihat dari Baturraden, begitu juga dengan Cilacap dan Nusa Kambangan. Ketika kita melihat gunung Slamet, kita dapat melihat lereng gunung Slamet yang ditutupi oleh hutan Heterogen.

Secara keseluruhan, kawasan wisata Baturraden memang sesuai sebagai sarana rekreasi keluarga, perusahaan ataupun perorangan. Selain itu di Baturraden para pengunjung juga dapat melakukan terapi penyakit melalui air panas yang baik untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit karna airnya mengandung zat belerang.

Lokawisata Baturraden memiliki banyak wahana rekreasi seperti halnya Kebun Raya dan Taman Botani, Air Terjun, Atraksi Air Terjun Gumawang, Pemandian air panas, Kolam renang, Arena mainan anak, Flying Fox, Kereta mini, Kereta listrik,Mogen (mobil genjot), Sepeda Air, Komedi Putar, Teater Alam, Menaran Pandang, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Selain mempunyai wahana rekreasi, di Baturraden juga terdapat air terjun alami dimana air yang mengalir cukup deras diantara bebatuan cadas yang membelah kawasan ini. Air terjun ini merupakan salah satu tempat yang menjadi favorit bagi pengunjung karena berada dilokasi terbuka dengan genangan/ tampungan air yang tidak begitu dalam dan sangat sesuai untuk bermain air.[3]

[3] http://www.visitBanyumas.com/destinasi/item/lokawisata-baturraden 14/01/2015 20.34 wib

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas tahun 2012-2014

Tahun	2012	2013	2014
Jumlah pengunjung	442.861	433.147	383.853

Sumber Tabel: Memori SERTIJAB Kepala UPT Lokawisata Baturraden tahun 2015

Berdasarkan tabel jumlah kunjungan di atas, dapat diketahui bahwa kunjungan wisatawan obyek wisata Baturraden mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun tidak terjadi kenaikan jumlah pengunjung ditiap tahunnya, namun pada tahun 2014 dengan keadaan gunung slamet yang berstatus siaga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Baturraden.

Melihat potensi yang dimiliki Baturraden sebagai menyumbang PAD Kabupaten Banyumas cukup tinggi, pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam pembenahan lokawisata ini. Mengingat masih banyaknya hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas pariwisata. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana perawatan yang dilakukan untuk membuat lokawisata Baturraden tetap terlihat indah sehingga pengunjung yang datang dapat merasa puas dan nyaman. Apabila pengunjung sudah merasa terjamin kenyamanannya dapat dipastikan jumlah pengunjung setiap tahunnya, kemudian berdampak pula kepada pemasukan Pendapatan Asli Daerah atau bisa disingkat PAD.

Tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Bayumas pada tahun 2012 memiliki jumlah kunjungan yang cukup banyak yaitu 815.890 dengan pertumbuhan rata-rata wisatawan 3,8%. Untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 terdapat 173 hotel yang terdiri dari hotel bintang sebanyak 9 buah, kemudian hotel termasuk hotel non bintang sebanyak 164 buah. Selain hotel, terdapat juga Restoran dan juga Ruamah makan sebanyak 317 buah, Biro Perjalanan Wisata sebanyak 15, Usaha Rekreasi dan hiburan umum (Diskotik) sebanyak 5 buah.[4]

Pemerintah Kabupaten Banyumas dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dana melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah melalui retribusi yang didapatkan dari Loka Wisata Baturraden. Terobosan dimaksud salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas dan menambah wahana-wahana baru . Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah terutama retribusi obyek wisata dan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya, sehingga nantinya dapat membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka judul dalam penelitian ini adalah EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERH (STUDIKASUS DI OBYEK WISATA BATURRADEN) TAHUN 2014.

---

[4]Ibid

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Banyumas dalam megembangan Obyek Wisata Baturraden untuk menignkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap retribusi obyek wisata Baturraden, serta pengaruh obyek wisata yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya wisata Baturraden terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu tolak ukur kinerja dinas yang ilmiahdan dapat menjadi bahan pengembangan studi banding dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Secara praktis, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten Banyumas dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari sektor Pariwisata.

E. Kerangka teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda.[5]

Menurut Freidrick kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang di usulkan tersebut ditunjukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.[6]

Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk : mewujudkan nilai-nilai yang di idealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan; memecahkan masalah misalnya : masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk; memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor, melindungi masyarakat dari praktek swasta yang

---

[5] Riant Nugroho D.2003. *Kebijakan Publik.* PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Hal 3
[6] Ibid.hal 50

merugikan misalnya pembuatan Undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan ijin gangguan.[7]

I. Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Murcholis dalam buku Administrasi Pemerinta Daerah; sejarah; konsep dan penatalaksanaan di indonesia adalah sebagai berikut.

a) Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat.
b) Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
c) Kebijakan harus dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
d) Kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan maslah.[8]

II. Jenis-jenis Kebijakan

Pembagian pertama dari kebijakan publik dijabarkan dalam makna dari kebijakan publik, yaitu hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan atau dibiarkan. Pemerintah memutuskan untuk memasuki usaha-usaha ekomnomi, persenjataan,

---

[7] Erwin Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.* Gava Media. Yogyakarta. Hal 64

[8] Arenawati.2014. *Administrasi Pemerintah daerah; Sejarah, Konsep dan penatalaksanaan di Indonesia.* Graha Ilmu. Yohyakarta. Hal 83

perpupukan dan penerbangan, namun menghasilkan laba besar seperti consumer good, industri pulp dan paper, minyak goreng, kedua pemilihan ini adalah kebijakan publik yang diputuskan pemerintah.[9]

Disini kebijakan publik dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Regulatif versus deregulatif; atau restiktif versus non restiktif adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
b) Alokatif versus distributif adalah kebijakan yang biasanya berupa kebijaka-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keluaran publik.

Meskipun demikian, secara lebih luas, pembagiannya dapat diperluas lagi menjadi :

a) Regulatif versus deregulatif; atau restiktif versus non restiktif adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
b) Alokatif versus distributif adalah kebijakan yang biasanya berupa kebijaka-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keluaran publik.
c) Dinamisasi versis stabilisasi adalah Kebijakan yang bersifat menggerakan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki.

[9] Riant Nugroho.2014. *Public Policy.* PT Elex Media komputindo. Jakarta. Hal 187

d) Memperkuat negaraversus memperkuat masyarakat/pasar. Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara, sementar kebijakan yang memperkuat pasar atau publik adlah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik atau mekanisme pasar daripada peran pemerintah.

III. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan otorisat negara yang mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumberdayanya atau risorsis, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumberdaya negara dan bertujuan menyerap sumberdaya negara. Jadi pemahaman adalah Distributif versus absortif (kebijakan publik yang bertujuan untuk mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumberdaya negara).[10]

2. Evaluasi Kebijakan

I. Pengertian evaluasi kenijakan

Pengertian Evaluasi Kebijakan menurut para ahli, William N. Dunn[11] mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing – masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat

[10] Riant Nugroho.2014.*Public Policy.* PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Hal 153
[11] Riant Nugroho,2009.*Public Policy*,Jakarta Pusat,hal 536

disamakan dengan penaksiran (apprasial) , pemberian angka (ratting), dan penilaian (assesment). Kata – kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Vackmias[12] menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan sebagai suatu pengkajian secara sistematik, empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijaksanaan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan – tujuan yang hendak dicapai oleh kebijaksanaan tersebut.

Menurut Patton dan Savicky evaluasi kebijakan merupakan evaluasi sitematis yang berkenaan dengan fisibilitas teknis dan ekonomi serta viabilitas politis alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan dan adopsi kebijakan. Proses analisisnya dilakukan sebelum kebijakan atau setelah kebijakan (berbentuk deskritif).[13]

Dari beberapa pengertian evaluasi kebijakan menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan riset yang dirancang untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

II. Model- model evaluasi kebijakan

Ernest R. House mengelompokkan model-model evaluasi kebijakan menjadi :

---

[12] Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin,2014.*Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,Hal 6

[13] Nugroho, Riant,2009.*Public Policy*,Jakarta Pusat,hal 536

a. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.

b. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas.

c. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.

d. Model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama yaitu pilihan pengguna dan manfaat sosial.

e. Model kekritisan seni (art criticism), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.

f. Model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.

g. Model kuasi legal (*quasi legal*), dengan indikator utama adalah resolusi.

h. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Secara umum William N.Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tipe Evaluasi Menurut Dunn

No.	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?	Unit pelayanan
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang	Unit biaya, manfaat

		diinginkan ?	brsih, rasio cost-benefit
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?	Biaya tetap, efektivitas tetap
4.	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok – kelompok yang berbeda ?	Kriteria pareto, kriteria kaldorhicks, kriteria rawls.
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survei warga negra.
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai ?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber tabel : Riant Nugroho,2009.*Public Policy*,Jakarta Pusat, hal 537

Sebagai pembanding Wirawan membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis;[14]

a. Evaluasi kebijakan "kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadi pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pejabat sebelumnya". Istilah lainnya ialah analisis kebijakan, analisis kebijakan adalah menetukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi

[14] Wirawan. 2012. *Evaluasi ; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

b. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program adalah "metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program". Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Program Pengembangan Pariwisata yang merupakan program Dinas Pemuda,Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan jenis evaluasi yang ada maka masuk dalam jenis evaluasi program dan akan di evaluasi dengan tahapan evaluasi program yang sesuai.

c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek sebagai "kegiatan aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program".

d. Evaluasi material

Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus

dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau *human resources development.* Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat".

III. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk juga mengemukakan evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi antara lain[15] :

1. Eksplanasi.

Melalui evaluasi dapat dipotret relitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalitas tentang pola – pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

[15] Nugroho, Riant,2009.*Public Policy*,Jakarta Pusat,hal 541

2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar – benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial – ekonomi dari kebijakan tersebut.

IV. Jenis- jenis evaluasi kebijakan

Bingham dan Felbinger membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis antara lain[16] :

1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
2. Evaluasi impak yang berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan
4. Meta – evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

[16] Nugroho, Riant,2009.*Public Policy*,Jakarta Pusat,hal 542

Sedangkan Howlet dan Ramesh mengelompokkan evaluasi menjadi tiga jenis yaitu[17] :

1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya. Dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan :

a) Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
b) Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
c) Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
d) Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
e) Process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

---

[17] Nugroho, Riant,2009.*Public Policy*,Jakarta Pusat,hal 542

3. Evaluasi Program

Menurut John L Herman Program adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat. Menurut Suharsimi Arikunto program dapat dipahami dalam dua makna yaitu secara umum dan khusus.[18]

Secara umum, program dapat di artikan dengan recana atau rancangan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dikemudian hari. Sedangkan pengertian secara khusus dari program biasanya dikaitkan dengan evaluasi yaitu suatu unit kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.[19]

Evaluasi program menurut Kirkpatrick dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengeahui efektifitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh evaluator.[20]

Evert Vedung mengemukakan empat kriteria dalam evaluasi program sebagai berikut :[21]

a. Efektif
b. Produktivitas
c. Efisiensi (*cost-benefit*)

---

[18] Mintarti, dkk, "*Zakat dan Empowering".*Kajian Perumusan, hal 23
[19] Ibid.,hal 23
[20] Udiutomo,dkk.,"*Zakat dan Empowering"*. Evaluasi dan Kaji Dampak, hal 70
[21] Wirawan. 2012. *Evaluasi ; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.hal 9

d. Efisiensi (*cost-effectiveness*)

Kemudian Hamalik mengemukakan bahwa model atau jenis evaluasi program sebagai berikut;[22]

a. Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan implemntasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program dikemudian hari.

b. Evaluasi *monitoring* dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesai secara spesifik dalam program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran.

c. Evaluasi dampak, bertujuan menilai seberapa jauh proram program dapat memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program berdampak positif atau justru sebaliknya. Dampak tersebut diukur berdasarkan kriteria-kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu di spesifikasi agar dapat diamati dan diukur setelah program dilaksanakan.

[22] Oemar, Hamalik. 2003. *Proses Belajar Mengajar.* Jakarta : PT. Bumi Aksara.

d. Evaluasi efisiensi, dmaksud untuk menilai seberapa besar tingkat efisiensi suatu program. Apakah program mampu memberikan keuntungan.

e. Evaluasi program komprehensip, yaitu dampak menyeluruh terhadap program yang meliputi; implemntasi program, dampak atau pengaruh setelah program dilaksanakan dan tingkat efisiensi program.

Selanjutnya Wirawan mengelompokkan evaluasi program menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu :[23]

1. Evaluasi proses (*process evaluation*) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
2. Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
3. Evaluasi akibat (*impact evaluation*) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan informasi dengan menggunakan pengelompokan evaluasi menurut Wirawan, yaitu evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi dampak. Dimana untuk melihat

[23] Wirawan. 2012. *Evaluasi ; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada hal 17

serta menilai pelaksanaan program Pengembangan Pariwisata dinilai dari proses, manfaat dan dampaknya.

4. Pariwisata

I. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan/rutinitas sehari-hari, keluar dari kediamannya. Aktifitas yang dilakukan selama mereka berada ditempat mereka tuju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan merka. Adapun peran pengelola kegiatan pariwisata sangat diperlukan untuk menahan para wisatawan untuk bisa berada di daerah wisata dan bagai mana wisatawan lebih menikmati lingkungan sekitar dengan nyaman selama melakukan perjalanan wisata.[24]

Menurut undang-undang No. 10 tahun 2009 pasal I ayat 3 adalah:

"Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah".

Oka a. Yoeti menyebutkan pariwisata adalah sebuah perjalanan yang dilakukan sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain, kegiatan yang dilakukan dengan maksud bukan untuk berusaha (*bussines*) ataupun mencari nafkah di tempat yang menjadi tujuan kunjungan, akan tetapi semata-mata hanya untuk menikmati perjalanan

[24]Marpaung happy,SH,"pengetahuan kePariwisataan",alfabeta bandung,2000,hal 13

tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau unutk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Nyoman S. Pendit memper rinci penggolongan pariwisata menjadi beberapa jenis yaitu:[25]

1. Wisata budaya

Merupakan wisata yang bertujuan untuk memperluas pandangan seseorang/ pengetahuan seseorang dengannmelakukan perjalanan ke suatu tempat baik itu dalam ataupun luar negri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka..

2. Wisata kesehatan

Kegiatan ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan yang mempunyai tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal untuk kepentingan beristirahat baginya baik itu dalam arti jasmani ataupun rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandug mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang memilii iklim udara menyehatkan atau tempat yang memiliki fasilitas kesehatan lainnya..

3. Wisata olahraga

Kegiatan wista yang dimaksud adalah wisata yang melakukan suatu perjalanan dengan tujuan untuk berolahraga ataupun memang sengaja bermaksud untuk ikut mengambil bagian aktif dalam peserta olahraga disuatu tempat atau negara, seperti asean games, olympiade, thomas cup,

[25] Iqbal Manggara Putra, *Strategi Pembangunan Industri Pariwisata di Kabupaten Belitung Tahun 2008-2010,* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2010). Skripsi tidak di terbitkan.

uber cup dan lain-lain. Bisa saja olahraga memancing, berburu dan berenang.

4. Wisata komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalana untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

5. Wisata industri

Kegiatan perjalann ini biasanya dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang awam ke dalam kompleks perindustrian yang didalamnya terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Seperti misalnya, rombongan pelajar yang mengnjungi industri tekstil.

6. Wisata politik

Perjalan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik. Misalnya, ulangtahun 17 agustus di Jakarta, perayaan 10 oktober di moskow, penobatan ratu inggris, kongres atau konveksi politik yang disertai dengan darmawisata.

7. Wisata konvensi

Perjalana yang dilakukan untuk melakukan konvensi atau koferensi misalnya Apec, Ktt non blok.

8. Wisata sosial

Merupakan pengorganisasian suat perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah

untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

9. Wisata pertanian

Merupakan suatu pengorganisasian perjalanan yang dilakukan keproyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembbitan, dimana wisatawan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi atau hanya melihat-lihat sekeliling sambil menikmati segarnya tanaman yang beraneka ragam warna dan suburnya pembibitan di tempat yang di kunjungi.

10. Wisata maritim (marina) atau bahari

Wisata yang dikaitkan dengan olahraga di air, lebih-lebih danau, bengawan, teluk atau laut. Seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar,balapan mendayung dan lainnya.

11. Wisata cagar alam

Wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan,daerah pegunungan dan sebagainya.

12. Wisata berburu

Wisata untuk berburu, ditempat atau hutan yang telah ditetapkan pemerintah negara yang bersangkutan sebagai daerah perburuan, seperti di baluran, jawa timur untuk menembak babi hutan dan banteng.

13. Wisata pilgrim

Jenis perjalanan wisata ini dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau perorangan yang mendatangi tempat-tempat suci atau ke makam- makam orang besar, bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman pimpinan atau tokoh yang di anggap legenda. Sebagai contoh mendatangi makam bngkarno di Blitar, makam wali songo, kemudian tempat ibadah seperti candi borobudur, pura besakih di Bali, sedang sono di Jawa tengah dan lain sebagainya.

14. Wisata bulan madu.

Suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan, pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilits khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

II. Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup berbagai segi, diantaranya adalah :[26]

1) Segi seni dan budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi, seni budaya didaerah yang dikunjungi.

[26]Direktorat Jendral Pariwisata, pengantar Pariwisata indonesia, jakarta, 1976, hal 29

2) Segi Ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas daar-dasar perekonomian suatu negara.

3) Menunjang Perbaikan Kesehatan dan Prasarana kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walau hanya sementara waktu.

4) Pemeliharaan Pemanfaatan lingkungan hidup

Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya jika dibina dengan baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar.

5) Memperluas lapangan kerja

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga kerja. Sebagai industri yang sifatnya melayani maka membutuhkan unsur cepat, aman, murah, mudah dan juga ramah.

6) Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan

Hubungan yang terjalin antara wisatawan dan masyarakat yang dikunjingi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, manusia akan menyadari nilai-nilai yang dimilikinya.

III. Sasaran Pariwisata

Pada dasarnya sasaran pariwisata itu ditunjukan kepada masyarakat umum tanpa pandang status sosialnya dan juga bagian bagi masyarakat yang membutuhka susasana lain atau yang baru dirutinitas sehari-harinya. Sasaran Pariwisata bagi masyarakat umum ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Bagi wisatawan luar negri atau mancanegara

   Sasaran pariwisata ditujukan bagi wisatawan mancanegara agar mereka tertarik untuk datang berkunjung, tentunya dengan menonjolkan kelebihan atau daya tarik suatu obyek wisata.

b) Bagi wisatawan domestik atau wisatawan dalam negeri.

   Sasaran pariwisata ini khususnya ditujukan bagi masyarakat didalam negri itu sendiri.

IV. Pengembangan Pariwisata

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang berupa obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain, kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, keanekaragaman bentuk kesenian, pengembangan pariwisata sebagaimana tertera di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu perkenalan nilai budaya bangsa dan meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa, kelestarian serta mutu lingkungan hidup dan merupakan

pembangunan pariwisata dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor lain serta antara pengusaha agar mereka dapat saling menunjang.[27]

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa: Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.[28]

Pengembangan pariwisata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga aspek yaitu ekonomi, fisik dan sosial, meskipun agak sulit untuk diberikan batasan yang jelas mengenai pengelompokan dampak ini, oleh karena masing-masing memiliki keterkaitan sebab akibat yang kuat. Pengembangan pariwisata tersebut dapat dilakukan dari dua segi yaitu :

1. Dari segi fisik
   a) Membangun sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata
   b) Melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada di lokasi obyek wisata
2. Dari segi non fisik
   a) Meningkatkan pelayanan (*service*) kepada para penunjang dengan meningkatkan daya manusia pengelola obyek wisata.
   b) Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung

---

[27]Gamal Suwantoro, *"Dasar-dasar Pariwisata"*, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2001 hal 25
[28]Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

c) Memperhatikan suseatu yang khas yang ada di daerah seperti makanan khas, kerajinan-kerajinan khas.[29]

Kemudian menurut Gamal Suwantoro Pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata meliputi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan terhadap lima unsur, yaitu;

1. Obyek dan daya tarik wisata
2. Prasarana wisata
3. Sarana wisata
4. Tata laksana/ infrastruktur
5. Masyarakat/ lingkungan

Dengan alasan pembangunan pariwisata pada suatu daerah tertentu tersebut diharapkan pada pengambil kebijakan hendaklah sebelum melakukan penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulaidari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat di sekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung kedaerah tersebut.[30]

5. Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologis berasal dari bahasa yunani ”*autos”* yang berarti sendiri, dan “*nomos”* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encylopedia of social science,* penegertian original otonomi adalah “ *The legal self sufficiency of social body and its actual independence”.* Dengan demikian terdapat dua ciri otonomi yaitu *legalself sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik/ pemerintah, otonomi daerah dimaknai sebagai *self goverment* atau *The condition of living under one’s own*

[29]Oka A. Yoeti*,”Pemasaran Pariwisata”,* Penerbit Angkasa, Bandung, 1985, hal 46
[30]Oka A. Yoeti, *Perencanaan dan pengembangan pariwisata,* PT. Pradnya Paramita, Jakarta

laws. Jadi otonomi daerah bermakna daerah memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self goverment* yang diatur dan diurus oleh aturan sendiri.[31]

Menurut H.A.W. Widjaya menyatakan bahwa Daerah otonom adalalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah dengan Otonomi merupakan suatu peralihan dari sistem demokrasi kesistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pererintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka *system birokrasi* pemerintahan. Sedangkan yang menjadi tujuan otonomi ialah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat.[32]

Sedangkan menurut UU nomor 32 tahun 2004 adalah merupakan suatu kelanjutan dari pelaksanaan otonomi daerah bersahkan UU nomor 22 tahun 1999 yang sangat menjunjung tinggi asas otonomi seluas-luasnya bagi daerah sebagai manifestasi dari semangat reformasi hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia dengan beberapa koreksi didalamnya. Berdasarkan undang-undang tesebut paradigma pemerintahan daerah yang akan dikembangkan adalah bertumpu pada demokrasi, pemberdayaan dan pelayanan. Yaitu suatu pemerintah daerah yagn memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan seluruh potensi yang dimiliki dalam mendukung kualitas pelayanan publk yang di jalankan.[33]

---

[31]Dyah Mutiarin & Arif Zaenal, Op.cit.hlm.45.
[32]H.A.W. Widjaja, Op.cit.hlm.76
[33]Ibid.hlm.49.

Dari pemahaman tentang makna otonomi daerah di atas, dapat disimpulkan mana otonomi daerah adalah:

1) Hak mengurus rumahtangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan pada Daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga merupakan keotonomian suatu daerah: penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri serta pembiayaan dan pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi dan berubah kembali menjadi urusan Pemerintah Pusat.
2) Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batasan-batasan wilayah daerahnya.
3) Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan padanya.
4) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian seuatu daerah otonom adalah daerah yang *self goverment, self sufficiency, self authority,* dan *self regulation its laws and affair* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonomi memiliki *actual.*[34]

6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan dearah yang terpisah, dan lain pendapatan asli daerah yang sah.[35] Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan meperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan dearah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian

[34]Ibid,hlm.45-46.
[35]Mardiasmo.2002.otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta. Andi. Hal 132

kewenangan serta tatacara penyelenggara kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya, dana perimbangan terdiri dari :

1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan penerimaan sumber daya alam (SDA).
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus.

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan imbangan 10% untuk pemerintahan pusat dan 90% untuk pemerintahan daerah. Penerimaan daerah dari bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) akan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintahan pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan daerah dari bagi hasil PBB dan BPHTB tersebut akan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan daerah kota.

Dalam sistem pemerintahan yang tersentralistik yang dialami bangsa ini selama orde lama dan orde baru dalam masa pembangunan telah menimbulkan efek-efek negatif. Efek negatif negatif tersebut misalnya tersentralisasi telah memasung kreativitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralisasi telah menyebabkan pemerintahan daerah semakin kuat ketergantungannya terhadap pemerintah daerah.[36] Kedua hal tersebut cukup membuat pemerintah dan masyarakat tidak dapat berkembang untuk membangun daerahnya.

[36]Ibid,hlm.145

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peran PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Menerimaan daerah yang harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Pendapatan asli daerah yang merupakan pencerminan pertumbuhan ekonomi di suatu pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada taxable capacity atau kapasitas perpajakan kabupaten/ kota yang bersangkutan, sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak-pajak daerah asli daerah seperti, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak perhotelan, restoran, reklame, retribusi dan keuntungan dari badan usaha milik daerah (BUMD).

Besar pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula PAD tidak bisa dikembangkan oleh pemerintahan daerah. Salah satu dilema pembangunan daerah adalah kemampuan pendanaan dan sebagian besar daerah ternyata masih menganadalkan dana alokasi umum untuk menutupi kekurangan fiskalnya. Pajak daerah dan retribusi daerah memegang peran dalam

pembiayaan otonomi daerah. Kekuatan daerah harus didukung oleh sumber keuangan, khususnya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.[37]

F. Definisi Konseptual

1. Kebijakan publik

Sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda.

2. Evaluasi kebijakan

Suatu kegiatan riset yang dirancang untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

3. Evaluasi Program

Merupakan metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

4. Pariwisata

Merupakan suatu perjalanan atau perpindahan sementara ke sesuatu tempat yang bertujuan untuk bertamasya dan berrekreasi.

5. Otonomi daerah

Kewenangan daerah otonom untuk mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undanganan.

6. Pendapatan asli daerah

---

[37]Zakir, Implementasi Program Peningkatan Pendapatan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah oleh Unit Pelaksana Teknik Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Thn 2007-08

Pendapatan yang dihasilkan dari semua kekayaan yang dimiliki daerah sebagai penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu petunjuk bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga seseorang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu pengukuran. Adapun definisi operasional mempunyai fungsi mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui suatu variabel sehingga seseorang dapat mengtehui baik atau buruknya suatu pengukuran.[38]

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk mengukur pengembangan obyek wisata Baturraden untuk menunjang PAD pemerintahan Kab Banyumas, maka indikator-indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Program pengembangan
   a. Proses Program
   b. Manfaat Program
   c. Dampak program
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
   a. Aspek pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan PAD
   b. Peningkatan kualitas Sumer Daya Manusia pengelola PAD

[38]Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *metode penelitian social*, Bumi Aksara, Jakarta

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat dari apa yang di ingin dicapai dan menjadi tujuan dari penelitian ini, yang menggambarkan Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Banyumas Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di Obyek Wisata Baturraden) tahun 2014 maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang menggunakan metode kualitatif.

Denzin dan Lincoln berpendapat bahwa kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan suatu pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peniliti menekankan sifat realitas yang tergantung secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.[39]

Salah satu yang menjadi landasan penelitian kualitatif adalah deskriptif, artinya penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai realitas fenomena sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya sebagai ciri, karakter, sifat model, tanda gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.[40]Kemudian selain dari itu, semua yang

---

[39]Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin,*Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* ,(Jogjakarta: JKSG,2014),hlm 33-34

[40]Burhan Bungin, *penelitian kualitatif*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007),hlm 68.

dikumpulakan mempunyai kemungkinan untuk menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam hal ini, metode penelitian kualitatif akan dilakukan untuk mendeskripsikan Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Banyumas dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di obyek wisata Baturraden) tahun 2014.

2. Unit Analisis Data

Menurut Suharsini Arikunto bahwa ”yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian”

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, dalam melakukan pembangunan di lokawisata Baturraden.

3. Jenis Analisis Data

Data yang digunakan dan dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Banyumas dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di Obyek Wisata Baturraden) tahun 2014, ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulan oleh peneliti atau (petugas-petugasnya) dari sumber pertama.[41] Data ini diperoleh langsung dari sumber dengan cara wawancara yang berupa keterangan-

[41]Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1983),hlm 39

keterangan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh suatu organisasi atau perorangan yang didapat dari pihak lain yang mengumpulka dan mengelolanya.[42]Data ini diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, koran, jurnal, dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpuan data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu kesimpulan, data yang dikumpulkan harus merupakan data yang riil terjadi di lapangan. Agar data yang dikumpulakan baik dan benar, maka teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi pengamatan adalah suatu keseharian manusia yang dilakukan dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utama selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang unutk menggunakan pengatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta

[42]Siti Waridah Q, dkk, *sosiologi2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2001), hlm 91.

dibantu dengan panca indra lainnya. Dari pemahaman observasi atau pengamatan tersebut, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melaui pengamatan dan pengindraan.[43]

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu proses unutk memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumbernya, dengan ataupun tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, diman pewawancara dan informan terlibat kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian yang menjadi ciri utama wawancara adalah adanya keterlibatannya didalam kehidupan informan..[44]

Dalam proses wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan responden atau staf Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas dan lain sebagainya yang akan mendukung peneliti dalam menelesaikan skripsi ini. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Bapak Kasirun, S.pd,: Kepala Seksi Obyek dan Pariwisata Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan,dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
2. Bapak Djoko Harianto b.a,: Kepala UPT Lokawisata Baturraden
3. Bapak Ali, Pengunjung Lokawisata Baturraden

---

[43]Burhan Bungin, *peneliti kualitatif,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 118.
[44]Ibid.hlm.111.

4. Bapak Eko Juwarto, Pengunjung Obyek Wisata Baturraden
5. Bapak Darto, Ketua Kelompok Cascade
6. Bapak Agus Riyanto, Ketua Kelompok Sepeda Air
7. Bapak Sugeng Riyadi, Anggota Kelompok Pemamdia Air Panas
8. Bapak Tarko, Kepala Kelompok Kolam Renang
9. Bapak Tarikun, Kepala Kelompok Taman Botani

5. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, buku-buku atau catatan harian, cendera mata, laporan, dokumen pemerintah maupum swasta, *web site* dan lain-lain.[45]

Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan, menganalisis data-data tertulis dalam dokumen-dokumen seerti catatan harian, transkip, surat kabar, buku dan media cetak lainnya. Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen majalah, jurnal, dan kolom dalam media massa yang bermanfaat untuk melengkapi informasi yangdibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan berita-berita lisan dan tulisan dari media massa, terdapat

[45]Ibid, hlm.124-125

beberapa ketentuan yang harus dipahami sebagai syarat keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Obyektif, apa adanya.
2. Tidak memihak sehingga tidak menyesatkan pengumpul data
3. Mengandung wawasan ilmiah
4. Aktual. [46]

6. Teknik Analisis Data

Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif maka data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dianalisis menggunakan angka-angka, tetapi melainkan data yang diperoleh akan diklasifikasikan atau dikategorikan dan kemudian di deskripsikan, serta kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan kepentingan penelitian.[47]

Dalam menganalisi data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat induktif yaitu analisi yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya menjadi data yang terus menerus sehingga dapat ditarik kesimpulan.[48]

---

[46]Rizal Khadafi Nasution, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2008 Berdasarkan PP No.6 Tahun 2008,* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2010). Skripsi tidak di terbitkan.

[47]Andre Ristian, *Analisis Sikap Politik DPD Partai Demokrat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Keistimewaaan Yogyakarta Tahun 2009-2011,* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogakarta 2012), skripsi tidak diterbitkan.

[48]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: penerbit Alfabeta,2009), hlm 89.